

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia. Dengan populasi hampir mencapai 270.054.853 jiwa pada tahun 2018, menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar urutan keempat di dunia. Memiliki sumber daya alam yang melimpah, suku yang beragam dan kebudayaan yang tidak ada habisnya. Namun dengan banyaknya populasi yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang. Peningkatan populasi di Indonesia menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sandang, pangan, dan papan. Sayangnya penawaran terhadap barang-barang ini tidak dapat disuplai dalam jangka waktu pendek karena kurangnya faktor pendukung, seperti modal, bahan baku, tenaga kerja terlatih, dan sebagainya.

Menurut Taufiq et al, 2020 (hlm 26) Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 0,37% dengan perbandingan pada bulan Maret 2019 sejumlah 25,14 juta orang (9,41%) berselang satu tahun yakni Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang (9,78%). Menurut Bhinandi (2017 hlm 9) Kemiskinan merupakan gambaran kondisi kekosongan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau secara lebih rinci menggambarkan suatu keadaan tidak bisa tercukupinya kebutuhan dasar manusia yang berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Selain itu, yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara berkembang yaitu masih tingginya angka pengangguran serta tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh banyak faktor, beberapa diantaranya pendidikan yang rendah, kemampuan (*skill*) yang rendah, tingkat pertumbuhan yang tinggi dan tidak meratanya pembangunan infrastruktur. Guna mengurangi beberapa permasalahan tersebut dan menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang maju maka perlu adanya pengembangan sumber daya manusia dengan pembangunan nasional Indonesia.

Pembangunan nasional berparadigma yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan seluruhnya mencakup pembangunan manusia, sedikitnya terdapat empat kebijakan pokok dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yaitu: peningkatan kualitas hidup yang meliputi kualitas manusia seperti jasmani dan rohani. Serta kualitas kehidupan masyarakat seperti perumahan dan pemukiman sehat.

Selanjutnya, pemerintah diharapkan dapat mendorong pengembangan sumber daya manusia yang ada di masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan *skill* kepada masyarakat yang di dapat baik dari suatu lembaga tertentu maupun program pemberdayaan yang ada di masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun potensi masyarakat dengan upaya membangkitkan, memotivasi, dan mendorong kemampuan yang dimilikinya serta mengembangkan potensi mereka dalam bentuk nyata.

Menurut Permendesa No 6 Tahun 2020 tentang perubahan prioritas dana desa 2020 Pasal 1 No 56, Pemberdayaan Masyarakat desa merupakan suatu kegiatan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan serta pemanfaatan sumberdaya melalui penepatan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang disesuaikan dengan esensi masalah, serta prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan juga merupakan upaya untuk menghadapi permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Salah satu permasalahan yang hingga saat ini terjadi adalah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. (Zubaedi, 2007). Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa "Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan prakarsa dan kreativitas, dan meningkatkan peran fungsi masyarakat".

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat

secara tegas tertulis dalam GBHN tahun 1999, serta UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya dalam “Arahan Kebijakan Pembangunan Daerah”, dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”.

Sebagaimana Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 serta Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yakni meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi, sosial dan politik. Maka program pemberdayaan melalui kelompok PKK diharapkan nantinya dapat mencapai tujuan pemberdayaan sebagaimana Undang-Undang tersebut.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah Kelompok Perempuan yang didalamnya mencakup ibu rumah tangga, dan Perempuan-Perempuan di usia produktif yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Jika setiap keluarga dapat mencapai kesejahteraannya masing-masing, yang kuat dan sejahtera pun akan terwujud. Dengan membangun masyarakat dari bawah, yang dititik beratkan pada kaum Perempuan atau ibu yang diyakini menjadi tonggak kesejahteraan keluarga sebagai ibu rumah tangga.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah Kelompok masyarakat yang mampu menjadi pelopor partisipasi masyarakat dalam hal keterampilan, serta berperan dalam kegiatan pertumbuhan masyarakat tersebut. PKK menjadi gerakan yang lahir dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat dengan upaya lembaga yang dikenal baik

di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan ataupun desa.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mengajak anggota sampai lapisan bawah dengan melibatkan partisipasi perempuan utamanya ibu rumah tangga yang ingin bergabung dan membantu menjadi pengurus organisasi PKK. Harapannya agar perempuan-perempuan desa dapat meningkatkan *skill* dan perannya sebagai perempuan dapat terimplikasi dengan baik. Program yang terdapat di kelompok PKK ini dapat menjadi jalan menuju keluarga sejahtera. Berkaitan dengan kesejahteraan keluarga maka perempuan diharapkan mampu untuk membantu keluarganya. Kondisi tersebut merupakan motivasi yang kuat bagi perempuan untuk bekerja dalam menambah pendapatan finansial. Dengan penerapan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di setiap desa diharapkan setiap keluarga di desa tersebut dapat berdaya dan mengembangkan potensinya masing-masing, khususnya bagi perempuan yang sejatinya belum mempunyai keterampilan dalam memberdayakan diri.

Berdasarkan tujuh belas sasaran atau tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh 193 Negara anggota PBB pada Sidang Umum PBB di New York yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, kemitraan untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, berdasarkan delapan sasaran *Millennium Development Goals* yang telah disetujui oleh 189 Kepala Negara atau pemimpin dunia pada Sidang Umum PBB di New York yaitu 8 fungsi keluarga secara terpadu, yang menjadi pokoknya fungsi agama atau ketuhanan Yang Maha Esa, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi atau wirausaha dan fungsi lingkungan. (Bappenas, 2010).

Konsolidasi fungsi-fungsi utama tersebut diinginkan kemungkinan setiap

keluarga semakin berdaya membangun dirinya menuju keluarga sejahtera, keluarga swasembada, dan keluarga yang mampu melewati ancaman mendatang dengan lebih baik. Seorang perempuan harus mampu mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dimilikinya, karena setiap manusia diberikan potensi yang berbeda oleh Tuhan yang Maha Esa baik yang bersumber dari manusia itu sendiri, baik tenaga, minat dan kesanggupan. Ilmu pengetahuan dan keterampilan maupun yang bersumber dari faktor lainnya seperti waktu, uang, materi dan fasilitas atau dikenal dengan sebutan 6 M yaitu: *Man, Money, Method, Material, Mechine, dan Market* sehingga terciptanya kesejahteraan hidup dalam rumah tangga.

Perempuan adalah satu dari dua jenis manusia yang diciptakan. Sebagai manusia, perempuan juga diharapkan mampu untuk menjalankan seluruh hak-hak dan kewajiban yang terlimpahkan kepadanya. (Shaqr, 2006). Perempuan juga merupakan seorang manusia yang memiliki dorongan keibuan yang merupakan dorongan intinkif yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan biologis dan fisiologis, mereka sangat melindungi dan menyayangi anak-anak terutama yang masih kecil. (Murad dalam Ibrahim, 2005).

Peran kaum perempuan dalam pembangunan sangat besar, sebab itu sebagian besar program pembangunan di desa-desa diurus dan ditujukan pada kaum perempuan dan dalam hal ini perempuan diposisikan sebagai sasaran strategis pembangunan. Dengan begitu diharapkan program pembangunan yang dilaksanakan membawa pengaruh ganda (*multiplier effect*) pada bidang lain dibanding jika program tersebut ditujukan kepada kaum laki-laki. Karena mendidik seorang laki-laki berarti mendidik seorang manusia, sedangkan mendidik seorang perempuan berarti mendidik satu generasi. (Wardiman, 1995 dalam Marzuki, 2012).

Adapun perempuan dalam pandangan sejarah memiliki peran yang beragam. Perempuan sebagai ibu, istri, petani, pengelola perusahaan, pekerja sukarela, kepala desa dan sebagainya. Keadaan peran dan status perempuan saat ini dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi, dan praktek hidup sehari-hari. Hal ini menjadi kunci dibutuhkannya partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa yang mengalami kelemahan. Rendahnya kontribusi perempuan secara kuantitatif dalam segala bidang akan mendorong dan menjadi

latar belakang munculnya gerakan yang melibatkan partisipasi perempuan.

Perempuan dalam pembangunan bangsa pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan status, peran, keahlian, kemandirian, dan kekuatan mental, serta agama, perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Berkaitan dengan hal itu, perempuan juga diarahkan pada aspek penganggulangan kemiskinan, peningkatan kapasitas dan kemandirian serta perkembangan sumberdaya manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia, serta memotivasi peningkatan peserta aktif dan partisipasi seluruh masyarakat.

Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dinilai dari sisi *humanisme* saja. Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kontribusinya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri. Kontribusi perempuan menjadi syarat wajib dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang lahir dari bawah yang pengelolaannya beraskan demokrasi yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. Menuju terciptanya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak muliadan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dengan menjadi wadah dalam membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi bagi keluarga sejahtera.”

Gerakan PKK mempunyai sasaran khusus yakni keluarga di pedesaan dan perkotaan sebagai sasaran yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuannya dan kepribadiannya dalam bidang mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai hamba tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fisik material yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. (Sutedjo

dalam Gufran, 2015, hlm 3).

Berperan sebagai penggerak kepada keluarga dan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur Dinas atau Instansi Pemerintah terkait. Dengan membentuk IV (empat) Kelompok Kerja atau Kelompok Kerja yang memiliki tugas yang berbeda-beda, yaitu Kelompok Kerja I tugasnya yang berkaitan dengan penghayatan Pancasila dan gotong royong, Kelompok Kerja II tugasnya berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan, Kelompok Kerja III tugasnya berkaitan dengan program sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, Kelompok Kerja IV tugasnya berkaitan dengan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga sebagai program pokok PKK. (Kurnia, 2013, hlm 132).

Dengan mewujudkan cita-cita masyarakat dalam pemberdayaan tersebut, dibentuknya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini masyarakat khususnya perempuan diharapkan mampu menciptakan kondisi keluarga yang sejahtera, yaitu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri. Sehingga keluarga dapat berfungsi dengan baik, dapat menjadikan anak bangsa menjadi sumber daya manusia yang beriman, bermutu dan handal serta mampu membangun negara dan bangsanya menjadi lebih baik.

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang sasarannya adalah perempuan dilaksanakan dengan adanya *recrutment* anggota yang ingin bergabung dan membantu menjadi pengurus PKK untuk wilayah tertentu seperti di wilayah Desa Cilampungilir, Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. Dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan penyesuaian aturan pemerintah serta rasa empati Pemerintah desa terhadap perempuan yang jumlahnya tidak jauh berbedadengan laki-laki di desa tersebut.

Selain itu, jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa tersebut juga masih tergolong besar yaitu sebanyak 545 Kepala Keluarga (KK) atau 24% dari jumlah Kepala Keluarga yang terdapat di Desa tersebut. Masalah dan kebutuhan keluarga setiap tahunnya akan terus berkembang, dengan begitu kerumitan masalah yang

dihadapi juga bertumbuh tinggi. Diperlukan dukungan dalam pemberdayaan, pendampingan paripurna dan berkelanjutan agar setiap keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi utamanya dengan baik untuk memperbaiki mutu seluruh anggota keluarganya.

Perempuan di Desa Cilampunghilir masih belum mampu untuk mengembangkan potensinya secara mandiri dalam memperoleh kesejahteraan finansial, hal tersebut diakibatkan oleh tingkat pendidikan pada perempuan di Desa Cilampunghilir mayoritas adalah Sekolah Dasar (SD). Sehingga menjadikan perempuan-perempuan di Desa Cilampunghilir tidak memiliki ilmu yang luas dan upaya untuk mengembangkan potensi dirinya. Dengan mengandalkan hasil kebun dan persawahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perempuan di Desa Cilampunghilir membutuhkan dorongan dari para petinggi desa dalam membantu mewujudkan cita- citanya.

Guna mencapai tujuan dalam menjalankan program perlu dilaksanakan 10 program yang dimiliki oleh PKK yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong rotong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat yang dilakukan oleh kader PKK Cilampunghilir. Keterkaitan perempuan dengan PKK yaitu perihal bagaimana perempuan andal dalam mencapai kesejahteraan keluarga melalui keikutsertaannya di PKK sehingga kehadiran perempuan diakui oleh semua pihak.

Dalam menjalankan kewajibannya untuk memberdayakan keluarga khususnya perempuan PKK Cilampunghilir juga mendirikan koperasi simpan pinjam yang diharapkan dapat membantu merealisasikan segala kebutuhan perempuan khususnya dalam keluarga dengan turut melibatkan perempuan dalam mengurus sistem pengelolaan koperasi. Koperasi yang didirikan tersebut berperan dalam membantu memberdayakan masyarakat khususnya perempuan dari segi sandang, pangan, papan dan finansial yang tentunya menitik beratkan pada keuntungan masyarakat sebagai penggunaannya. Dengan melibatkan perempuan (ibu rumah tangga) yang memiliki harapan memperbaiki mutu dan pendapatan finansial keluarga.

Sehingga Desa Cilampunghilir mampu untuk bersaing dengan daerah lain dalam pengembangan potensi masyarakat desa dan juga menaikkan taraf hidup masyarakat dengan pendapatan finansial yang sudah berkembang. Menjalankan sistem simpan pinjam layaknya koperasi pada umumnya, koperasi yang dinaungi oleh PKK Cilampunghilir dapat merekrut banyak anggota yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan program tersebut. Dengan demikian di Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya upaya pemberdayaan dilakukan terhadap perempuan dengan cara meningkatkan produktivitas kelompok kemasyarakatan melalui pembentukan dan pembinaan kelompok seperti program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Berdasarkan dengan permasalahan diatas mengenai pentingnya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan maka penulis dalam hal ini terdorong untuk mencoba melakukan penelitian bahwa PKK sebagai salah satu Kelompok kemasyarakatan desa yang mampu memberdayakan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis merencanakan penelitian dengan judul “ **Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok PKK (Studi pada Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cilampunghilir, Kabupaten Tasikmalaya)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah yang diambil peneliti di awal riset dengan menjelaskan apa masalah yang ditemukan dan bagaimana masalah tersebut diukur dan dihubungkan dengan prosedur penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui beberapa masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 24% dari 545 Kepala Keluarga berstatus Rumah Tangga Miskin.
- b. Mayoritas tingkat pendidikan pada perempuan di Desa Cilampunghilir adalah Sekolah Dasar (SD).
- c. Perempuan di Desa Cilampunghilir belum mampu mengembangkan potensinya secara mandiri guna memperoleh kesejahteraan finansial.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat sebuah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait dengan objek yang diteliti yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. (Noor, 2016, hlm 25). Dengan melihat latar belakang diatas peneliti merasa perlu mengetahui lebih mendalam masalah yang berkenaan dengan “Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok PKK?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok PKK di Desa Cilampunghilir, Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun praktis guna mengembangkan suatu ilmu dan memecahkan masalah yang dituangkan dalam bentuk penjelasan sehingga berguna untuk memprediksikan dan mengendalikan suatu gejala. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menghasilkan dua kegunaan tersebut. Kegunaan secara teoritis dan praktis

dalam penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti, pembaca dan juga masyarakat terkait Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok Pkk yang kurang diketahui orang banyak.
- b. Sebagai bahan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian seputar Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok Pkk.
- c. Sebagai bahan masukan kepada Pengurus Kelompok Pkk Desa Cilampunghilir dalam memberdayakan perempuan, dan juga sebagai bahan masukan bagi perempuan khususnya di Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. Agar lebih maju dan berkembang dalam meningkatkan keterampilan diri sehingga potensi mereka makin meningkat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini berguna untuk menambahkan wawasan bagi peneliti mengenai Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sehingga hasilnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan peneliti guna meningkatkan *Skill* dan potensi peneliti.
- b. Bagi Masyarakat Umum, Penelitian ini berguna sebagai sumber informasi seputar Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sehingga masyarakat setempat khususnya perempuan dapat mengaplikasikan program agar lebih berdaya. Bagi Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penelitian ini berguna sebagai sumber referensi dan evaluasi bagi Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap program yang telah dikembangkannya khususnya koperasi sehingga dapat meningkatkan elektabilitas dan loyalitas anggota terhadap keberadaan koperasi tersebut.
- c. Bagi Pemerintah Desa Cilampunghilir, Penelitian ini berguna sebagai sumber referensi dan evaluasi bagi pemerintah Desa Cilampunghilir terkait dengan

Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati atau diteliti (Notoatmodjo, 2005, hlm 158). Untuk menghindari timbulnya perbedaan pendapat dan pemahaman oleh pembaca terkait hal-hal yang dimaksud maka peneliti memberikan penekanan istilah terhadap judul penelitian Pemberdayaan Perempuan Melalui Koperasi Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya. Adapun definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1.6.1 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah upaya untuk merubah pola pikir dan tatanan hidup masyarakat dari yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dan mempunyai kemandirian, memberdayakan perempuan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran fungsi perempuan yang tergabung dalam Kelompok PKK, melalui pemberayaan *life skill*, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan keluarga dan sebagainya.

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Desa Cilampunghilir adalah dengan pembentukan Kelompok Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga yang didasari oleh penyesuaian terhadap peraturan dari Pemerintah Pusat serta rasa empati Pemerintah Desa terhadap perempuan di wilayah tersebut yang belum mampu untuk mengembangkan potensinya, serta tidak atau belum memiliki keterampilan yang dapat dijadikan sebagai daya beli perempuan di desa tersebut guna memperoleh eksistensi kehadiran perempuan. Dengan begitu perempuan akan lebih percaya diri untuk mengekspresikan dirinya sehingga tidak lagi bergantung kepada laki-laki dan juga dalam membantu laki-laki sebagai kepala keluarga dalam merealisasikan kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dengan program yang paling berimbas dan memiliki manfaat yang lebih adalah di dirikannya koperasi simpan pinjam. pada Pendirian koperasi dalam

pemberdayaan perempuan diharapkan mampu menciptakan kemandirian finansial perempuan dan dapat menyongkong kehidupan perekonomian di Desa Cilampunghilir sehingga dapat mengurangi jumlah Rumah Tangga Miskin, dengan demikian akan menciptakan kerukunan kesejahteraan dalam keluarga.

1.6.2 Koperasi

Koperasi adalah salah satu wadah yang dapat menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali ke anggotanya, guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kemajuan kelompok usaha, utamanya adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari rumah tangga seperti kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) diharapkan mampu untuk mensejahterakan masyarakat sehingga masyarakat dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Kelompok ini perlu terus mengembangkan seluruh aspek baik dari segi peningkatan pendapatan, kemampuan mengelola dan dapat memberikan efek terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat sekitarnya dengan terjun menjadi anggota koperasi.

Koperasi di Desa Cilampunghilir di dirikan oleh kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga guna mengkordinir potensi masyarakat terutamanya ibu rumah tangga atau perempuan, sehingga perempuan tidak lagi dianggap lemah dan tidak memiliki kemampuan. Guna menunjang sistem perekonomian masyarakat, koperasi Cilampunghilir menjadi wadah untuk anggota kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam mensejahterakan perekonomian keluarganya. Dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip koperasi dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang mengorganisi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya.

1.6.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan membangun masyarakat yang dibentuk oleh perempuan untuk meningkatkan potensi dirinya. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya dibentuk bersamaan dengan pembentukannya Desa Cilampunghilir. Namun efektivitas kegiatannya berlangsung pada tahun 2007 dengan sasaran perempuan atau ibu rumah tangga di

desa tersebut. terdiri dari IV (empat) Kelompok kerja yang masing-masing telah memiliki tugas.

Dengan berpedoman pada 10 program pokok PKK maka dibuatlah program Kelompok Perempuan Tani (KWT) dengan berlandaskan pada program pangan, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, serta kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, di PKK Cilampungilir juga terdapat program Kampung KB dengan berlandaskan pada program penghayatan dan pengamalan pancasila, kesehatan dan perencanaan sehat. Selanjutnya PKK Cilampungilir juga sering mengadakan program gotong royong yang berkolaborasi dengan program setiap wilayah serta koperasi yang ditujukan untuk anggota PKK Cilampungilir guna menunjang perekonomian perempuan di Desa Cilampungilir. Dan program yang paling berdampak pada PKK Cilampungilir saat ini adalah kegiatan usaha Koperasi.